

## PENINGKATAN LITERASI TRANSAKSI DIGITAL BAGI PETANI-PETERNAK DI DESA LABANGKA, KABUPATEN SUMBAWA

**Nurul Hilmiati**

Laboratorium Sosial-Ekonomi / Fakultas Peternakan, Universitas Mataram  
Email: nurul.hilmiati@gmail.com

Naskah diterima: 03-11-2025, disetujui: 13-01-2026, diterbitkan: 30-01-2026  
DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/jppm.v9i1.10616>

**Abstrak** - Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap pola transaksi keuangan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Kehadiran layanan keuangan digital seperti mobile banking, dompet digital, dan platform pembayaran elektronik telah memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan membuka peluang peningkatan kesejahteraan melalui perluasan akses pasar dan penguatan inklusi keuangan. Namun demikian, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan menimbulkan risiko baru, seperti kerentanan terhadap penipuan, jebakan hutang, biaya tersembunyi, hingga perjudian daring. Oleh karena itu, diperlukan program penyuluhan yang mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan teknologi keuangan digital secara bijak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Labangka, Kabupaten Sumbawa, dengan melibatkan tiga kelompok sasaran, yaitu petani peternak laki-laki, perempuan, dan pemuda, masing-masing terdiri dari sepuluh orang. Metode yang digunakan adalah penyuluhan berbasis partisipatif, dengan strategi diskusi kelompok, berbagi pengalaman, serta penggunaan media visual untuk memudahkan pemahaman. Materi yang dibahas mencakup pola pemanfaatan platform transaksi digital, manfaat transaksi elektronik, serta risiko dan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat telah merasakan manfaat nyata dari transaksi digital, seperti efisiensi waktu, kemudahan akses, dan perluasan pemasaran. Namun, masih ditemukan permasalahan serius berupa rendahnya kesadaran terhadap aspek keamanan, kecenderungan konsumtif, dan meningkatnya praktik perjudian daring yang menyebabkan kerugian sosial ekonomi signifikan. Dengan demikian, program literasi digital perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi finansial secara aman, cerdas, dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan.

**Kata kunci:** literasi digital, platform transaksi, inklusi keuangan, masyarakat pedesaan

### LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital dalam dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan social-ekonomi masyarakat termasuk di wilayah pedesaan. Salah satu bentuk transformasi paling menonjol adalah digitalisasi layanan keuangan, seperti mobile banking, dompet digital, dan platform pembayaran elektronik. Inovasi ini tidak lagi hanya mendominasi wilayah perkotaan, tetapi juga mulai menjangkau desa-desa termasuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mana mayoritas penduduknya masih mengandalkan sector pertanian sebagai sumber penghidupan dengan pola integrasi antara tanaman pangan dan ternak. Digitalisasi ini membuka peluang besar

dalam meningkatkan efisiensi, memperluas akses pasar, serta mendorong tercapainya inklusi keuangan di wilayah yang selama ini kurang terlayani (Pellu, 2024).

Berbagai kajian telah menegaskan potensi positif dari transformasi transaksi keuangan berbasis digital untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat desa. Inklusi keuangan berbasis digital terbukti mampu meningkatkan daya beli, memperluas akses permodalan, dan mendukung revitalisasi ekonomi pedesaan. Study Li et al. (2025) menunjukkan bahwa layanan keuangan digital mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga pedesaan dan memperbaiki distribusi ekonomi. Demikian pula, Wang & Zhang (2025) menekankan bahwa layanan keuangan digital menjadi sarana

strategis untuk mempercepat inklusi keuangan di daerah tertinggal yang memiliki keterbatasan akses perbankan konvensional. Di Indonesia, digitalisasi juga terbukti mengubah pola pengelolaan mata pencaharian masyarakat desa serta interaksi mereka dengan pasar (Fahmi & Mendorfa, 2024). Dengan demikian, digitalisasi keuangan berpotensi menjadi katalis dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Meskipun memiliki peluang besar, tantangan literasi transaksi digital di pedesaan masih cukup nyata. Survei di India menemukan bahwa meski sikap masyarakat desa terhadap pembayaran digital cenderung positif, pemahaman mereka terkait efektivitas, keamanan, serta fitur aplikasi masih terbatas (Vayalambron, 2024). Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana keterampilan operasional digital dan aspek keamanan (digital safety) masih rendah di pedesaan (Akbar & Wijaya, 2024). Sementara itu, Trisnadewi (2025) menekankan bahwa adopsi transaksi digital sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga serta persepsi risiko yang melekat pada teknologi tersebut. Rendahnya literasi ini berimplikasi pada meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap risiko penipuan, biaya tersembunyi, hingga jebakan utang yang banyak terjadi melalui platform digital (Wang & Zhang, 2025).

Selain itu, masih terdapat persoalan kesenjangan digital (digital divide) yang membuat sebagian masyarakat pedesaan belum mampu memanfaatkan layanan ini secara optimal. Faktor infrastruktur, ketersediaan jaringan internet, dan keterbatasan perangkat masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi secara sistematis. Studi empiris menegaskan bahwa tanpa peningkatan literasi digital yang memadai, digitalisasi justru berpotensi memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi di pedesaan (Freeman et al., 2020).

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat pedesaan terhadap transaksi digital. Program literasi keuangan berbasis partisipatif menjadi salah satu strategi yang efektif karena tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga mendorong kesadaran kritis masyarakat terhadap manfaat dan risiko yang menyertai layanan keuangan digital. Dengan adanya edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat pedesaan mampu menggunakan platform transaksi digital secara bijak, aman, dan berkelanjutan, sehingga digitalisasi benar-benar berperan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada bulan September di Desa Labangka 4, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sasaran kegiatan adalah masyarakat petani-peternak yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu kelompok laki-laki, kelompok perempuan, dan kelompok pemuda tani-ternak. Setiap kelompok terdiri dari sepuluh orang peserta, sehingga total peserta berjumlah tiga puluh orang.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan berbasis partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, di mana peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berkontribusi aktif melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Model partisipatif terbukti meningkatkan keterlibatan, rasa memiliki, serta efektivitas program penyuluhan (Kiara, 2011; Mingote, 2018). Dalam konteks literasi digital, pendekatan partisipatif juga dinilai lebih relevan untuk masyarakat pedesaan karena materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan latar belakang sosial peserta (Kiara, 2011).

Strategi pelaksanaan diwujudkan melalui diskusi kelompok, sesi tanya jawab, serta pemanfaatan alat peraga visual untuk menjembatani keterbatasan pemahaman teknis. Model ini mendukung prinsip demand-driven education, yaitu penyuluhan yang diarahkan oleh kebutuhan peserta agar lebih tepat sasaran dan aplikatif (Pellu, 2024).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap koordinasi dan pelaksanaan. Tahap awal dimulai dengan koordinasi bersama tokoh masyarakat setempat, yang dilanjutkan dengan komunikasi resmi kepada perangkat desa dan penyuluhan pertanian. Koordinasi ini bertujuan memastikan dukungan kelembagaan serta menciptakan iklim kolaboratif. Setelah koordinasi dirasa sudah cukup kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui pertemuan dan diskusi pada kelompok-kelompok sasaran. Materi yang dibahas mencakup: infrastruktur pendukung transaksi digital, kepemilikan perangkat digital (telepon pintar, jaringan internet), pola penggunaan platform transaksi digital (BRIMO, Shopee Pay, Dana, BNI Mobile, Livin Mandiri, TikTok Shop), manfaat dan risiko transaksi digital, termasuk aspek keamanan, potensi penipuan, biaya tersembunyi, serta risiko jebakan utang.

Dalam pelaksanaan penyuluhan, peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta praktik yang mereka lakukan dalam menggunakan layanan digital. Diskusi interaktif ini terbukti dapat meningkatkan kesadaran kritis sekaligus memperkuat pembelajaran berbasis kasus nyata (Li *et al.*, 2025). Adapun kegiatan penyuluhan ditunjang dengan penggunaan alat peraga visual berupa gambar ilustratif dan perangkat digital sederhana. Media visual membantu menjelaskan konsep abstrak seperti keamanan digital dan risiko transaksi, yang seringkali sulit

dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan beragam (Wang & Zhang, 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai literasi transaksi digital di Desa Labangka menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan mulai mengenal dan memanfaatkan platform keuangan digital, meskipun masih terbatas. Penetrasi layanan ini mulai meningkat sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, yang memaksa masyarakat mencari alternatif transaksi di tengah pembatasan aktivitas sosial. Hal ini sejalan dengan study Calo *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa pandemi menjadi katalis percepatan adopsi layanan digital, termasuk di daerah terpencil.



**Gambar 1.** Penyuluhan literasi keuangan digital kepada para pemuda peternak di Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa.

Saat ini, platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah BRIMO, diikuti Shopee Pay dan Dana, sementara BNI Mobile, Livin Mandiri, dan TikTok Shop digunakan dalam proporsi yang lebih kecil. Pemanfaatan platform ini sebagian besar digunakan untuk transfer uang, pembelian kebutuhan sehari-hari secara daring, hingga pembayaran hasil transaksi pertanian. Masyarakat menilai kehadiran platform digital memberikan manfaat besar dari sisi kepraktisan dan efisiensi. Transaksi dapat dilakukan kapan saja tanpa bergantung pada jarak dan waktu.

Bahkan, digitalisasi membuka peluang bagi petani untuk menjual hasil panen langsung ke konsumen, sehingga mengurangi dominasi tengkulak. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Yang *et al.*, 2024) yang menegaskan bahwa digitalisasi keuangan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga pedesaan melalui akses pasar yang lebih luas.

Namun demikian, masyarakat juga melaporkan berbagai kendala dalam pemanfaatan platform transaksi digital, seperti risiko penipuan, biaya administrasi, kesalahan teknis (misalnya salah transfer), hingga kecenderungan konsumtif akibat kemudahan transaksi. Kekhawatiran utama masyarakat adalah aspek keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat pedesaan masih rendah terutama pada aspek *digital safety*. Selain itu, rendahnya literasi digital meningkatkan kerentanan terhadap jebakan utang dan kerugian finansial, sebagaimana ditegaskan oleh Wang & Zhang (2025) bahwa ekonomi digital dapat mendorong perilaku pengambilan risiko finansial berlebihan di masyarakat dengan literasi rendah.



**Gambar 2.** Penyuluhan literasi keuangan digital kepada para wanita peternak di Desa Labangka, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa.

Selain faktor literasi, kepercayaan terhadap lembaga keuangan juga berperan penting dalam mendorong adopsi. Lal *et al.* (2025) menegaskan bahwa tanpa adanya pemahaman kritis terhadap risiko, masyarakat cenderung menggunakan layanan digital hanya karena faktor kepraktisan. Kondisi ini sangat

mirip dengan temuan lapangan di Desa Labangka, di mana masyarakat mengaku menggunakan layanan digital untuk kemudahan, tetapi belum memahami implikasi keamanan data dan konsekuensi finansial jangka panjang.

Salah satu temuan paling mengkhawatirkan dalam kegiatan PKM ini adalah meningkatnya praktik perjudian daring yang memanfaatkan kemudahan transaksi digital. Berdasarkan diskusi kelompok terarah, sekitar tiga dari sepuluh warga terlibat dalam aktivitas ini, dengan kerugian finansial mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan, terdapat kasus ekstrem di mana keluarga harus menjual aset pertanian untuk melunasi utang akibat perjudian daring. Fenomena ini sejalan dengan kajian Lal *et al.* (2025) yang menyebutkan bahwa digitalisasi sistem keuangan telah menimbulkan risiko baru seperti penipuan siber dan eksklusi keuangan, terutama bagi mereka yang memiliki literasi keuangan digital rendah. Individu dengan literasi keuangan digital rendah lebih rentan terhadap penyalahgunaan instrumen keuangan digital dan peningkatan paparan penipuan, yang memperburuk kerentanan keuangan mereka.

Selain perjudian daring, penipuan dalam bentuk investasi palsu juga marak terjadi. Modus yang sering ditemui adalah menawarkan bunga tinggi pada transaksi awal, kemudian menghilang setelah masyarakat menyetorkan dana dalam jumlah besar. Kondisi ini menegaskan perlunya literasi digital yang tidak hanya teknis, tetapi juga mencakup kesadaran kritis terhadap modus-modus kejahatan digital. Penelitian Pellu (2024) menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital berbasis kasus nyata lebih efektif meningkatkan kewaspadaan masyarakat pedesaan terhadap praktik merugikan.

Berdasarkan temuan ini, terdapat dua implikasi penting dari peningkatan literasi

keuangan digital bagi masyarakat peternak di wilayah pedesaan. Implikasi pertama adalah implikasi teoretis. Hasil PKM mendukung teori bahwa literasi digital merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan inklusi keuangan. Masyarakat dengan literasi rendah akan lebih mudah terjebak dalam risiko keuangan meskipun memiliki akses teknologi (Wang & Zhang, 2025). Dengan demikian, literasi bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman kritis terhadap risiko dan peluang. Implikasi kedua adalah implikasi praktis. Program literasi digital perlu dirancang dengan pendekatan berbasis partisipatif dan *case-based learning*, yaitu menghadirkan contoh nyata kasus penipuan digital, pinjaman online ilegal, serta perjudian daring. Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat (Pellu, 2024).

Implikasi kedua adalah implikasi praktis pada level penyuluhan bagi masyarakat. Program penyuluhan perlu diperluas dengan pendekatan berbasis kasus nyata (*case-based learning*), di mana peserta diberi contoh konkret tentang modus penipuan digital, jebakan pinjaman online, hingga risiko perjudian daring. Edukasi semacam ini akan lebih relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari masyarakat, sekaligus meningkatkan kewaspadaan mereka.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) tentang literasi transaksi digital di Desa Labangka menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan telah menjangkau masyarakat pedesaan dan memberikan manfaat nyata, khususnya dari segi kepraktisan, efisiensi, dan akses pasar yang lebih luas. Platform seperti BRIMO, Shopee Pay, dan Dana menjadi sarana utama masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi harian.

Namun demikian, masih terdapat tantangan besar berupa rendahnya literasi digital

masyarakat. Peserta PKM menunjukkan keterampilan dasar dalam menggunakan aplikasi, tetapi pemahaman mereka terhadap aspek keamanan, risiko pinjaman daring, serta modus penipuan masih sangat terbatas. Rendahnya literasi ini menimbulkan kerentanan serius, termasuk kecenderungan konsumtif, jebakan utang, serta praktik perjudian daring yang menyebabkan kerugian finansial besar. Dengan demikian, literasi digital keuangan yang baik merupakan prasyarat utama untuk mencapai inklusi keuangan yang aman dan berkelanjutan. Tanpa itu, digitalisasi justru berpotensi memperdalam ketimpangan sosial-ekonomi di pedesaan.

Berdasarkan kegiatan PKM ini, beberapa saran diajukan untuk pemangku kepentingan yang berbeda. Bagi Masyarakat Desa. Saran yang disampaikan antara lain: meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan digital dengan memverifikasi setiap informasi transaksi; memanfaatkan fitur keamanan aplikasi, seperti otentikasi dua faktor dan PIN dinamis, untuk melindungi akun dari peretasan; dan mengelola penggunaan platform digital secara bijak agar tidak terjebak pada perilaku konsumtif maupun praktik ilegal seperti perjudian daring. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait. Saran yang disampaikan antara lain: menyelenggarakan program literasi digital keuangan secara berkelanjutan, berbasis kebutuhan lokal, dan berbasis kasus nyata (*case-based learning*) untuk meningkatkan relevansi materi; memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik pinjaman online ilegal serta platform transaksi digital yang rawan disalahgunakan. Bagi Perguruan Tinggi dan Akademisi. Saran yang disampaikan antara lain: melanjutkan kegiatan PKM dengan model pendampingan berkelanjutan yang memberikan pendampingan jangka panjang; mengembangkan modul literasi digital sederhana yang sesuai dengan konteks pedesaan agar dapat dipelajari secara mandiri

oleh masyarakat; melakukan penelitian lanjutan mengenai pola penggunaan transaksi digital di pedesaan serta faktor-faktor penghambat dan pendorong literasi digital sebagai feedback untuk merancang intervensi berbasis bukti.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada The University of Queensland yang dan Fakultas Peternakan Universitas Mataram yang telah memfasilitasi pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dan masyarakat Labangka atas kerjasama yang baik selama pelaksanaan kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M., & Wijaya, G. (2024, June 19). *Digital Literacy of Rural Areas in Indonesia: Challenges and Opportunities*. <https://doi.org/10.4108/eai.1-11-2023.2344347>

Calò, L., de Ruvo, E., Martino, A. M., Prenner, G., Manninger, M., & Scherr, D. (2020). Trends beyond the new normal: From remote monitoring to digital connectivity. *European Heart Journal, Supplement*, 22, P8–P12.

Fahmi, F. Z., & Mendoza, M. J. S. (2024). Digitalisation and Rural Livelihood Transformation: Evidence from Indonesia. *International Journal of Rural Management*, 20(3), 313–334.

Freeman, J., Park, S., & Middleton, C. (2020). Technological literacy and interrupted internet access. *Information Communication and Society*, 23(13), 1947–1964.

Kiara, J. K. (2011). Focal area approach: A participatory community planning approach to agricultural extension and market development in Kenya. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 9(1), 248–257.

Lal, S., Bawalle, A. A., Khan, M. S. R., & Kadoya, Y. (2025). What Determines Digital Financial Literacy? Evidence from a Large-Scale Investor Study in Japan. *Risks*, 13(8).

Li, X., Chen, Y., & Huang, Z. (2024). Exploring the dynamic impact of digital financial literacy on rural households. *Sustainability*, 17(8), 3385.

Li, W., Zhang, L., Pu, M., & Wang, H. (2025). Digital inclusive finance, rural revitalization and rural consumption. *PLoS ONE*, 20(1 January).

Mingote, C., & McNamara, P. E. (2018). Demands, responsibility, and influence in Malawi's participatory agricultural extension services. *Development in Practice*, 28(1), 81–94.

Pellu, A. (2024). Peningkatan akses keuangan: mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2, 279–295.

Trisnadewi, N. K. A. (2025). The Impact of Financial Technology Innovation and Trust Perception on Financial Transaction Interest Through the Risk of Using LPD Mobile. *International Journal of Social Science and Business*, 9(3), 545–554.

Vayalambron, I. (2024). Awareness and effectiveness of digital payment use among rural households. *IARJSET*, 11(6).

Wang, Y. Z., & Zhang, Z. T. (2025). Digital development and rural financial inclusion: Evidence from China. *Research in International Business and Finance*, 73, 102637.

Yang, N., Ao, X., & Tu, Y. (2024). The impact of digital financial development on rural household income mobility. *Finance Research Letters*, 63, 105368.

Wang, Y. Z., & Zhang, Z. T. (2025). Digital development and rural financial inclusion: Evidence from China. *Research in International Business and Finance*, 73, 102637.